

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkeu. (2013). Perguruan Tinggi Eks BHMN Lahir Kembali dengan Casing Baru. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/3952/Perguruan-Tinggi-Eks-BHMN-Lahir-Kembali-dengan-Casing-Baru.html>
- Abdi, H. (2021). Pengertian Organisasi Menurut Para Ahli Beserta Jenis dan Tujuannya. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/hot/read/4621531/pengertian-organisasi-menurut-para-ahli-beserta-jenis-dan-tujuannya> (Diakses pada 16 November 2023).
- Aninditha, D. Y. (2010). Penerapan New Public Management di Indonesia. Detik.Com. <https://news.detik.com/opini/d-1273191/penerapan-new-public-management-di-indonesia> (Diakses pada 11 Mei 2024).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2022). Lembaga Non-Profit sebagai Pelengkap Perekonomian. Jambi.bps.go.id. <https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/14/252/lembaga-non-profit-sebagai-pelengkap-perekonomian.html> (Diakses pada 30 Desember 2023).
- Darlis, A., Lubis, M. A., Farha, M., Laoli, R. R. P., & Lestari, S. I. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 585-597.
- Fachri, F. (2022). Nadiem Makarim Tantang Semua PTN Berubah Jadi PTN BH. *Republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/rlhfjz330/nadiem-makarim-tantang-semua-ptn-berubah-jadi-ptn-bh> (Diakses pada 9 November 2023).
- Fadilah, N. (2023). *Ruang Lingkup Organisasi Nirlaba*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Haryani, S., Akhdiyat, R., Iqbal, M., Mintarti, S., & Sari, W. I. (2023, January). Implementasi new public management (NPM) badan kepegawaian daerah (studi kasus Kabupaten B). In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, pp. 330-335.
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *ANUVA: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, Vol. 2(3), pp 317-324.
- Humas dan Protokol Unand. (2021). Dirjen Dikti Setujui Unand Jadi PTN BH. Universitas Andalas. <https://old.unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/3794-dirjen-dikti-unand-ptn-bh.html> (Diakses pada 17 November 2023).
- Husain, N. Q., Mas'ud, M., & Lannai, D. (2021). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemmungutan PPh 22 Universitas Hasanuddin. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, Vol. 2.
- Kemdikbud. (2022). Dana Abadi Perguruan Tinggi, Upaya Pemerintah Wujudkan Pendidikan Tinggi Indonesia Kelas Dunia. *Kemdikbud.go.Id*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/07/dana-abadi-perguruan-tinggi-upaya-pemerintah-wujudkan-pendidikan-tinggi-indonesia-kelas-dunia> (Diakses pada 16 November 2023).

- Kemenkeu. (2022). Menkeu Perkiraan Penerimaan Negara Tahun 2023 Meningkatkan Mencapai Rp2.443,6 Triliun. <https://www.niaga.asia/menkeu-perkiraan-pendapatan-negara-tahun-2023-rp2-4436-triliun/> (Diakses pada 17 November 2023).
- Kusumawardhani, S. P. (2022). Analisis Perlakuan Pendapatan PTN Terkait Perubahan Status Hukum dan Dampaknya terhadap Pengenaan PPH Badan (Studi Kasus Pada Universitas XYZ Depok).
- Lina Hamid, M., & Christine. (2019). Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 7(3), pp 419-432.
- R. Rianti. (2011). Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, 1-10.
- Rohmah, N. R. (2022). Pengelolaan Perguruan Tinggi Sebagai Organisasi Nirlaba. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5(2).
- Romanti. (2023). Mengetahui Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/> (Diakses pada 6 Januari 2024).
- Rudhianto, H., Utami, T., & Widarjo, W. (2022). Perbandingan Model Pola Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri. *MONEX*, Vol. 1.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusydi, M. K., Pusposari, D., Sofia, F. R., & Firdausi, N. A. (2023). Workshop Perhitungan Perpajakan di Lingkungan PTNBH Universitas Brawijaya. *JANKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2(2), pp 32-36.
- Suhdi, S., & Wardhani, R. (2020). *Tata Kelola Perguruan Tinggi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15), Pub. L. No. 34 (1995).
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Pub. L. No. 34 (2017).
- Surya, N. (2017). Kedudukan Dosen Pada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Yayasan di Indonesia. Universitas Andalas.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 12 (2012).
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007).

